
Analisis Belanja Infrastruktur Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Tenggara

Laode Dandi Saputra^{1*}, Muh. Yani Balaka², La Tondi³

^{1,2,3}Universitas Halu Oleo Kendari, Indonesia
Email: dandisaputratur@gmail.com

Diterima : 24-12-2024

Direvisi : 20-01-2025

Dipublikasikan : 22-01-2025

Abstract.

This research aims to test and analyze the Effect of Infrastructure Expenditure (X1) and Economic Growth (X2) on Poverty (Y) in the Regency/city of Southeast Sulawesi Province in 2017-2022. The data used is time series and cross section data from 17 regencies/cities in Southeast Sulawesi Province, in the form of secondary data for the period 2017-2022. The data analysis used is Data Panel Regression Analysis with Fixed Effect Model (FEM) model This research aims to test and analyze the Effect of Infrastructure Expenditure (X1) and Economic Growth (X2) on Poverty (Y) in the Regency/city of Southeast Sulawesi Province in 2017-2022. The data used includes infrastructure spending data, namely roads, electricity and irrigation, economic growth data and poverty data taken from the number of poor people. The data used is time series and cross section data from 17 regencies/cities in Southeast Sulawesi Province, in the form of secondary data for the period 2017-2022 sourced from the Directorate General of Financial Balance and the Central Statistics Agency. The data analysis used is Data Panel Regression Analysis with Fixed Effect Model (FEM) model. The results show that partially Infrastructure Expenditure (X1) has a negative and insignificant effect on Poverty (Y) in the regencies/cities of Southeast Sulawesi Province, and Economic Growth (X2) has a negative and significant effect on Poverty (Y) in the Regency/city of Southeast Sulawesi Province. Simultaneously Infrastructure Expenditure (X1) and Economic Growth (X2) affect Poverty (Y) in Regencies/cities of Southeast Sulawesi Province in 2017-2022.

Keywords: *Technology, Fashion, Conventional Marketing, Digital Marketing.*

Abstrak.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Belanja Infrastruktur (X1) dan Pertumbuhan Ekonomi (X2) Terhadap Kemiskinan (Y) di Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2022. Data yang digunakan meliputi data Belanja Infrastruktur yaitu Jalan, Listrik dan Irigasi, data Pertumbuhan Ekonomi dan Data Kemiskinan yang di ambil dari Jumlah Penduduk Miskin. Data yang digunakan adalah data *time series* dan *cross section* dari 17 Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, berupa data sekunder selama periode 2017-2022 yang bersumber dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik. **Metode** Analisis data yang digunakan yaitu Analisis Regresi Data Panel dengan model *Fixed Effect Model* (FEM). **Hasil penelitian** menunjukkan bahwa secara parsial Belanja Infrastruktur (X1) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kemiskinan (Y) di Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Pertumbuhan Ekonomi (X2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan (Y) di Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tenggara. **Kesimpulan** secara simultan Belanja Infrastruktur (X1) dan Pertumbuhan Ekonomi (X2) berpengaruh terhadap Kemiskinan (Y) di Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2022.

Kata Kunci: **Infrastruktur, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan**

PENDAHULUAN

Secara etimologis, kemiskinan berasal dari kata miskin yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Badan Pusat Statistik mendefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak lebih jauh disebutkan kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada dibawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan yang disebut garis kemiskinan (proverty line) atau disebut juga batas kemiskinan (poverty treshold). Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan lokasi lingkungan (Moh. Arif Nofriansyah, 2018

Pertumbuhan ekonomi merupakan tolak ukur keberhasilan Pembangunan ekonomi di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan pertambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Parameter pertumbuhan ekonomi dari penyediaan barang dan jasa yang dapat digunakan di dalam negeri, seperti peningkatan jumlah produk industri, peningkatan infrastruktur, penambahan sekolah, peningkatan penyediaan layanan dan peningkatan jumlah ahli bagasi (Mankiw, 2003).

Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai public capital atau modal public sekaligus investasi pemerintah, yang mencakup jalan, jembatan, dan sistem pembangunan lainnya (Mankiw, 2003). Pembangunan infrastruktur bergantung pada pendapatan asli daerah (PAD) yang kemudian dialokasikan pada belanja infrastruktur, seperti jalan banyak dilakukan karena menjadi pendukung utama dalam aktivitas distribusi pada kegiatan ekonomi masyarakat. Belanja modal dalam bentuk infrastruktur atau selanjutnya disebut belanja infrastruktur memiliki perhatian khusus karena menjadi fondasi bagi keadilan dalam pembangunan. Pembiayaan guna pelaksanaan pembangunan dapat melalui PAD yang terdiri atas pajak, retribusi daerah, dan lainnya (Khusaini, 2018:90). Adanya PAD diharapkan dapat mengurangi ketimpangan antar wilayah dengan menggunakannya untuk menyediakan fasilitas layanan publik baik dari segi pembangunan infrastruktur maupun sarana prasarana lainnya sesuai dengan kebutuhan. Pembangunan infrastruktur mendapatkan perhatian yang lebih banyak sebagai cara untuk mengurangi ketimpangan antar daerah.

Kemiskinan adalah fenomena global yang muncul bukan hanya diakibatkan oleh kurangnya sumber daya tetapi juga timbul karena keterbatasan akses terhadap sumber daya, informasi, peluang, pemberdayaan, dan mobilitas (World Bank 1994). Pemerintah di seluruh dunia menetapkan kemiskinan sebagai tantangan utama bagi pembangunan dan merumuskan beragam strategi kebijakan (Kwon & Kim, 2014; Sumner & Tiwari, 2011). Namun, pandemi Covid-19 yang melanda dunia sejak akhir 2019 telah menghambat laju penurunan kemiskinan secara global (Han et al., 2020; Hossain, 2021; Kumar & Pinky, 2021) (Noorikhshan, 2022). Keadaan ini semakin diperparah dengan kondisi tiga tahun belakangan ini yang disebabkan oleh penyebaran dari Wabah Virus Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), yang semakin menyulitkan tingkat perekonomian masyarakat (Nabilla, 2022).

Sulawesi Tenggara merupakan salah satu Provinsi yang ada di Indonesia yang ikut terkena dampak dari adanya Covid-19 dengan meningkatnya angka kemiskinan pada wilayah tersebut. Pada tahun 2020 tingkat kemiskinan Sulawesi Tenggara menurun mencapai 11 persen. Dan di tahun 2021 kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 318,70 ribu jiwa dengan persentase sebesar 16,66 persen. Kemudian di tahun 2022 mengalami penurunan hingga mencapai 309,79 ribu jiwa atau 11,17 persen. (BPS Prov Sultra, 2023). Presentase angka kemiskinan yang dilihat dari Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2017-2022 mengalami fluktuatif. Angka kemiskinan tertinggi terjadi di Kabupaten Konawe Kepulauan 17,81 persen di tahun 2021 sedangkan terendah terdapat di kota Kendari 4,34 persen di tahun 2020.

Penelitian terdahulu menyebutkan apabila ketimpangan diidentikkan dengan keterbelakangan atau kemiskinan maka negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi dapat mengurangi jumlah

penduduk miskin, tetapi tidak dapat menjamin adanya penurunan kemiskinan (Kuncoro dalam Wibowo, 2020). Salah satu tujuan dari pembangunan adalah pengentasan kemiskinan yang dapat diatasi melalui pembangunan infrastruktur. Penelitian Yoshino dan Nakahigashi (2000) menyimpulkan bahwa infrastruktur memiliki dampak pada peningkatan kegiatan produksi yang mana akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Nuraliyah (2011) juga mengatakan bahwa meningkatnya pertumbuhan ekonomi mengindikasikan terciptanya lapangan kerja, artinya semakin banyaknya orang yang bekerja dan pada akhirnya dapat mengurangi kemiskinan, sehingga infrastruktur juga dapat dijadikan mobil penggerak pembangunan daerah dan menjadi konektivitas antar wilayah. Perbaikan pada sektor infrastruktur tentunya dapat mendorong minat investasi asing dan domestik. Keberadaan Infrastruktur yang memadai seharusnya akan berkontribusi kepada kelancaran produksi maupun distribusi barang dan jasa antar wilayah yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Ilham et al. 2021).

LITERATURE REVIEW

Kesmiskinan

World Bank (2010) mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan dalam kesejahteraan, dan terdiri dari banyak dimensi. Hal ini termasuk penghasilan rendah dan ketidakmampuannya untuk mendapatkan barang dasar dan layanan yang diperlukan untuk bertahan hidup dengan martabat. Kemiskinan juga meliputi rendahnya tingkat

kehatan dan pendidikan, akses masyarakat miskin terhadap air bersih dan sanitasi, keamanan fisik yang tidak memadai, kurangnya suara dan kapasitas memadai, serta kesempatan untuk hidup yang lebih baik. Kemiskinan merupakan masalah klasik yang telah ada sejak manusia itu ada. Kemiskinan itu berwujud banyak dan akan terus menjadi persoalan dari masa ke masa. Kemiskinan adalah suatu masalah yang kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti: Tingkat pendapatan, Pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender dan kondisi lingkungan (Hambarasari dan Inggit, 2016).

Sebagaimana menurut Novianto (2003), esensi utama dari masalah kemiskinan adalah masalah aksesibilitas. Aksesibilitas berarti kemampuan seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat untuk mendapatkan sesuatu yang merupakan kebutuhan dasarnya dan seharusnya menjadi haknya sebagai manusia dan sebagai warga negara. Seseorang atau sekelompok orang yang miskin, mempunyai daya aksesibilitas yang rendah dan terbatas terhadap berbagai kebutuhan dan layanan dibandingkan mereka yang termasuk golongan menengah ataupun golongan kaya. Akses-akses yang tidak bisa didapat oleh masyarakat miskin yaitu: 1) akses untuk mendapatkan makanan yang layak, 2) akses untuk mendapatkan sandang yang layak, 3) akses untuk mendapatkan rumah yang layak, 4) akses untuk mendapatkan layanan kesehatan, 5) akses untuk mendapatkan layanan pendidikan, 6) akses kepada *leisure* dan *entertainment*, dan 7) akses untuk mendapatkan kualitas hidup yang layak.

Kotze (dalam Hikmat, 2004:6) menyatakan bahwa masyarakat miskin memiliki kemampuan yang relatif baik untuk memperoleh sumber melalui kesempatan yang ada. Kendatipun bantuan luar kadang-kadang digunakan, tetapi tidak begitu saja dapat dipastikan sehingga masyarakat bergantung pada dukungan dari luar. Pendekatan pemberdayaan ini dianggap tidak berhasil karena tidak ada masyarakat yang dapat hidup dan berkembang bila terisolasi dari kelompok masyarakat lainnya. Pengisolasian ini menimbulkan sikap pasif, bahkan keadaan menjadi semakin miskin. Menurut Chambers (dalam Suryawati, 2005) mengungkapkan bahwa kemiskinan itu terdiri dari lima dimensi, yaitu: a) kemiskinan (*proper*), b) ketidakberdayaan (*powerless*), c) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), d) ketergantungan (*dependence*), dan e) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis.

Infrastruktur

Menurut Kodoatie (2003:24), mendefinisikan infrastruktur sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga Listrik, Pembangunan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan lainnya untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi sosial. Menurut Hanafie (2010:21), adanya infrastruktur ekonomi yang memadai merupakan prakondisi bagi tumbuh kembangnya kegiatan agribisnis dan perekonomian secara umum di pedesaan, infrastruktur esensial bagi agribisnis dan perekonomian pedesaan secara umum mencakup sistem pengairan, pasar, komoditas pertanian, jalan raya, kelistrikan dan jaringan telekomunikasi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia infrastruktur dapat diartikan sebagai sarana dan prasarana umum. Sarana secara umum diketahui sebagai fasilitas publik seperti rumah sakit, jalan, jembatan, sanitasi, telpon dan sebagainya. Lebih jauh lagi, dalam ilmu ekonomi infrastruktur merupakan wujud dari *public capital* (modal publik) yang dibentuk dari investasi yang dilakukan pemerintah. Infrastruktur dalam penelitian ini meliputi jalan, jaringan dan irigasi (Mankiw, 2003:38). Familoni (2004:16), menyebut infrastruktur sebagai *basic essential service* dalam proses Pembangunan.

Menurut Hanafie (2010:27), infrastruktur dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis, yaitu:

- 1) Infrastruktur ekonomi, merupakan asset fisik yang diperlukan untuk memancing aktivitas ekonomi baik dalam produksi maupun konsumsi final, meliputi *public utilities* (tenaga, telekomunikasi, air minum, sanitasi dan gas), *public work* (jalan, bendungan, kanal, saluran irigasi dan drainase), serta sektor transportasi (jalan, rel, kereta api, angkutan Pelabuhan, lapangan terbang dan sebagainya).
- 2) Infrastruktur sosial, merupakan asset yang mendukung Kesehatan dan keahlian masyarakat, meliputi Pendidikan (sekolah dan perpustakaan), Kesehatan (rumah sakit dan pusat kesehatan), perumahan dan rekreasi (taman, museum dan lain-lain).
- 3) Infrastruktur administrasi/institusi, meliputi penegakan hukum, control administrasi dan koordinasi serta kebudayaan.

Ketersediaan Infrastruktur sangat penting dalam mendukung masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi sehingga akan memicu peningkatan pendapatan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi, selain itu tersedianya jaringan infrastruktur akan sangat penting dalam memperlancar aktivitas perdagangan dan investasi. Dengan membaiknya infrastruktur diharapkan akan memperlancar kinerja perekonomian daerah dan akan menciptakan lapangan kerja baru. Dengan adanya perbaikan infrastruktur akan meningkatkan pembangunan serta mengurangi angka kemiskinan.

Menurut Mandala Harefa (dalam Fatimah, 2018) infrastruktur memiliki peran yang penting karena sebagai pendukung supaya pembangunan ekonomi suatu negara dapat terwujud. Minimnya pembangunan infrastruktur menyebabkan potensi sumber daya yang berada di daerah tidak digunakan dengan optimal. Pembangunan infrastruktur daerah yang dilakukan sesuai kebutuhan daerah, maka akan merangsang peningkatan pendapatan masyarakatnya. Hal ini dikarenakan aktivitas ekonomi daerah ini meningkat akibat semakin tingginya dan semakin mudahnya mobilitas faktor produksi dan aktivitas perdagangan daerah tersebut. Pembangunan infrastruktur juga dapat mempengaruhi dalam menanggulangi angka kemiskinan.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi juga sering diartikan sebagai suatu proses peningkatan kapasitas produksi dalam suatu perekonomian secara terus menerus atau berkesinambungan sepanjang waktu sehingga menghasilkan tingkat pendapatan dan output nasional yang semakin lama semakin besar

(Todaro dan Smith, 2006).

Menurut Tarigan (2012), Pertumbuhan ekonomi merupakan penambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di suatu wilayah, penambahan pendapat tersebut adalah kenaikan seluruh nilai tambah (*value added*) yang terjadi di wilayah tersebut. Pendapatan wilayah menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut (Tanah, Modal, Tenaga kerja, dan Teknologi), hal ini berarti dapat menggambarkan kemakmuran daerah tersebut. Kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta di wilayah tersebut juga ditentukan oleh seberapa besar terjadi *Transfer Payment*, yaitu bagian pendapatan yang mengalir ke luar wilayah atau mendapat aliran dana dari luar wilayah. Menurut Kuznet dalam Jinghan (2012:57), mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan tujuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologi yang diperlukan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti penambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan produksi sektor jasa dan penambahan produksi barang modal. Untuk memberikan suatu gambaran mengenai pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara, ukuran yang selalu digunakan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional riil yang dicapai (Sukirno, 2011:43).

METODE PENELITIAN

Lokasi yang digunakan untuk dianalisis dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun objek penelitiannya adalah analisis pengaruh belanja infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di wilayah Sulawesi Tenggara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan dokumentasi resmi berupa sumber tertulis, seperti arsip, catatan atau dokumen resmi dan studi kepustakaan, yaitu suatu metode pengumpulan data dan informasi dengan cara mempelajari dan mengutip teori-teori dari sejumlah literatur yang berupa buku, jurnal, internet serta karya tulis lainnya. Peneliti menggunakan alat analisis berupa Eviews 12 yang merupakan aplikasi pengolah data. Penelitian ini akan dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan data panel, yaitu gabungan dari data *time series* dengan periode waktu tahun 2017-2022 dan data *cross section* dengan objek 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara (Kab. Buton, Kab. Konawe, Kab. Kolaka, Kab. Muna, Kota Kendari, Kota Bau-Bau, Kab. Konawe Selatan, Kab. Bombana, Kab. Wakatobi, Kab. Kolaka Utara, Kab. Konawe Utara, Kab. Buton Utara, Kab. Konawe Kepulauan, Kab. Kolaka Timur, Kab. Muna Barat, Kab. Buton Tengah, dan Kab. Buton Selatan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Chow

Uji Chow (*Chow Test*) merupakan pengujian yang dilakukan untuk menetapkan model mana yang tepat antara *Common Effect Model (Pooled Least Square)* atau *Fixed Effect Model* yang akan digunakan dalam estimasi data panel. Untuk melakukan uji *Chow Test* data terlebih dahulu dalam model regresi *Fixed Effect Model*. Hipotesis yang digunakan dalam menentukan mana yang lebih baik adalah:

H_0 : *Common Effect Model (Pooled Least Square)*

H_1 : *Fixed Effect Model*

Dasar penentuan hipotesis mana yang akan diterima adalah dengan membandingkan nilai probability

chi-

square dengan $\alpha = 0,05$. Apabila nilai probability *chi-square* lebih besar dari ($>$) 0,05 maka terima H_0 dan tolak H_1 . Apabila nilai probability F kurang dari ($<$) 0,05 maka terima H_1 dan tolak H_0 .

Tabel 1.1
Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	100.084478	(16,83)	0.0000
Cross-section Chi-square	307.050129	16	0.0000

Sumber: Hasil olah eviews 12

Berdasarkan hasil olah data di atas menunjukkan tingkat probabilitas Chi-square sebesar 0,0000. Jika dibandingkan dengan taraf signifikan sebesar $\alpha = 0,05$ (5%), maka nilai probabilitas Chi-square lebih kecil daripada nilai taraf signifikansi dimana, $0,0000 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal tersebut menandakan bahwa *Fixed Effect Model* lebih tepat untuk digunakan dibandingkan dengan *Common Effect Model*. Kemudian selanjutnya dilakukan pengujian antara *Fixed Effect Model* dengan *Random Effect Model*.

Uji Hausman

Uji Hausman (*Hausman Test*) merupakan pengujian yang dilakukan untuk menentukan metode yang paling baik antar *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model*. Untuk proses uji *Hausman Test* data lebih dahulu pada hasil model *Random Effect Model*. Hipotesis yang digunakan dalam menentukan mana yang lebih baik adalah:

H_0 : *Random Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

Dasar penentuan hipotesis mana yang akan diterima adalah dengan membandingkan nilai probability *chi-square* dengan $\alpha = 0,05$. Apabila nilai probability *chi-square* lebih besar dari ($>$) 0,05 maka terima H_0 dan tolak H_1 . Apabila nilai probability F kurang dari ($<$) 0,05 maka terima H_1 dan tolak H_0 .

Tabel 1.2
Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	10.097992	2	0.0064

Sumber: Hasil olah eviews 12

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai probabilitas Chi-square sebesar 0,0064. Jika dibandingkan dengan taraf signifikan $\alpha = 0,05$ (5%), maka nilai probabilitas Chi-square lebih kecil dimana $0,0064 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak sebaliknya H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa *Fixed Effect Model* lebih tepat untuk digunakan dibandingkan dengan *Random Effect Model*.

Regresi Data Panel *Fixed Effect Model* (FEM)

Berdasarkan hasil pemilihan model data panel, maka model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Tabel 1.3
Hasil Uji Signifikasi
Fixed Effect Model (FEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.727624	2.052177	3.765574	0.0003
LN_X1	0.176395	0.075121	2.348136	0.0212
X2	0.092355	0.028400	3.251985	0.0017

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.952661	Mean dependent var	12.95363
Adjusted R-squared	0.942395	S.D. dependent var	3.064371
S.E. of regression	0.735480	Akaike info criterion	2.389829
Sum squared resid	44.89720	Schwarz criterion	2.878794
Log likelihood	-102.8813	Hannan-Quinn criter.	2.587828
F-statistic	92.79594	Durbin-Watson stat	1.507658
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil Output Eviews 12, Data diolah (2024)

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa hasil penelitian model diperoleh bahwa belanja infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan sebagai berikut:

$$Y_{it} = a + \beta_1 LNX_{1it} + \beta_2 X_{2it} + e_{it}$$

$$Y_{it} = a + \beta_1 LNBR_{1it} + \beta_2 PE_{2it} + e_{it}$$

$$Y_{it} = 7,727624 + 0,176395 + 0,092355 + e_{it}$$

Dari hasil penelitian di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Belanja infrastruktur (X1) memiliki nilai koefisien regresi 0,176395 menunjukkan arah hubungan yang positif terhadap kemiskinan yang diukur dengan jumlah penduduk miskin secara statistik, hal ini berarti adanya hubungan yang positif pada kemiskinan berarti setiap terjadi kenaikan pada belanja infrastruktur sebesar 1% maka kemiskinan akan mengalami kenaikan sebesar 0,176395 persen (dengan menganggap variabel lainnya konstan atau sama dengan nol).
2. Pertumbuhan ekonomi (X2) memiliki nilai koefisien regresi 0,092355 menunjukkan arah hubungan yang positif terhadap kemiskinan secara statistik, hal ini berarti adanya hubungan yang positif pada kemiskinan berarti setiap terjadi kenaikan pada pertumbuhan ekonomi sebesar 1% maka kemiskinan akan mengalami kenaikan sebesar 0,092355 persen (dengan menganggap variabel lainnya konstan atau sama dengan nol).

Koefisien Determinasi (R²)

Hasil pengujian dengan menggunakan *Fixed Effect Model* menghasilkan nilai R² sebesar 95,26%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan model dalam menjelaskan belanja infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan sebesar 95,26%, sedangkan sisanya 4,74% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.

Uji Hipotesis

Uji-t

Hasil pengujian secara parsial (uji-t) dengan menggunakan metode *Fixed Effect Model* (FEM) dapat dilihat pada tabel 1.4 yang diolah menggunakan evies 12.

Tabel 1.4
Hasil Uji-t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.727624	2.052177	3.765574	0.0003
LN_X1	0.176395	0.075121	2.348136	0.0212
X2	0.092355	0.028400	3.251985	0.0017

Berdasarkan tabel 4.8 hasil uji parsial (uji-t) dengan metode *Fixed Effect Model* (FEM) diperoleh persamaan sebagai berikut:

1. Belanja infrastruktur (X1) memiliki nilai t-hitung yaitu 2,348136 dan memiliki nilai probabilitas $0,0212 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya belanja infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Sulawesi Tenggara.
2. Pertumbuhan ekonomi (X2) memiliki nilai t-hitung yaitu 3,251985 dan memiliki nilai probabilitas $0,0017 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Sulawesi Tenggara.

Uji-F

Hasil pengujian secara simultan (uji-F) dengan menggunakan metode *Fixed Effect Model* (FEM) dapat dilihat pada tabel 1.5

Tabel 1.5
Uji-F

R-squared	0.952661	Mean dependent var	12.95363
Adjusted R-squared	0.942395	S.D. dependent var	3.064371
S.E. of regression	0.735480	Akaike info criterion	2.389829
Sum squared resid	44.89720	Schwarz criterion	2.878794
Log likelihood	-102.8813	Hannan-Quinn criter.	2.587828
F-statistic	92.79594	Durbin-Watson stat	1.507658
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Hasil olah data Eviews 12

Berdasarkan Tabel 4.10 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas (F-statistik) sebesar $0,000000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya bahwa kedua variabel yaitu belanja infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan secara simultan.

Pembahasan

Pengaruh Belanja Infrastruktur terhadap Kemiskinan

Pada penelitian ini, dari hasil analisis data yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa, belanja infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Artinya, kenaikan belanja infrastruktur di Provinsi Sulawesi Tenggara akan berdampak positif pada kemiskinan, dimana peningkatan satu persen belanja infrastruktur maka kemiskinan akan ikut naik sebesar 0,176395% dengan asumsi variabel lainnya tetap (konstan). Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa belanja infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan hipotesis. Artinya ketika belanja infrastruktur meningkat maka Jumlah kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara akan ikut meningkat, begitu sebaliknya, apabila belanja infrastruktur Menurun, maka Kemiskinan akan menurun. Oleh sebab itu pengeluaran pemerintah di sektor infrastruktur pada tahun 2017 – 2022 belum mampu memberikan dampak yang baik dan mengatasi tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara secara langsung.

Analisis ini sebanding dengan (Risthi Khoirunnisa Wadana dan Whinarko Juli Prijanto 2021) Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengeluaran sektor infrastruktur berdampak positif dan

mempunyai dampak terhadap tingkat kemiskinan. Hal tersebut memberi asumsi bahwa alokasi biaya untuk bidang infrastruktur meningkat maka angka kemiskinan kemiskinan juga naik.

Sumodiningrat dalam bukunya “Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa” pada tahun 2009 menggambarkan alur akhir dari kemiskinan di Indonesia untuk tahun 2020. Meskipun secara tidak langsung investasi publik berupa infrastruktur menjadi salah satu lingkaran penuntasan kemiskinan. Hasil dari penelitian ini didukung oleh penelitian Kusmiatin (2014), yang menyatakan bahwa pengeluaran untuk infrastuktur mempunyai pengaruh yang negatif tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan. Penelitian ini bertentangan dengan Wibowo (2014) yang mengungkapkan pandangan yang berbeda dari hasil penelitiannya, yaitu mengungkapkan bahwa pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk infrastruktur secara signifikan mampu mengurangi angka kemiskinan.

Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh tetapi kecil sehingga tidak terlalu memberi penekanan terhadap angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal tersebut juga disebabkan dengan terbatasnya lapangan kerja saat ini tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang terdidik yang membutuhkan lapangan pekerjaan, sehingga masyarakat miskin yang memiliki pendidikan tinggi banyak yang tidak bekerja.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan

Pada penelitian ini, dari hasil analisis data yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa, pengolahan regresi data panel pertumbuhan ekonomi memiliki arah hubungan yang positif terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada pengujian hipotesis uji-t menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki hubungan yang positif dan signifikan. Artinya, peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara akan berdampak positif pada kemiskinan, dimana peningkatan satu persen pertumbuhan ekonomi maka akan meningkatkan kemiskinan sebesar 0,092355% dengan asumsi variabel lainnya tetap (konstan). Hal ini sejalan dengan hipotesis yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, artinya setiap pertumbuhan ekonomi naik maka kemiskinan akan ikut naik, begitu juga sebaliknya ketika pertumbuhan ekonomi menurun maka kemiskinan juga ikut menurun. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi sama sekali tidak dapat menurunkan tingkat kemiskinan, tingginya pertumbuhan ekonomi tidak selalu berarti terpenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang pada akhirnya menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah/daerah tidak secara langsung dapat menurunkan kemiskinan.

Teori trickle-down effect (Albert O. Hirschman). Teori tersebut mengimplikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan diikuti oleh aliran vertikal dari penduduk kaya ke penduduk miskin yang terjadi dengan sendirinya. Manfaat pertumbuhan ekonomi akan dirasakan penduduk kaya terlebih dahulu, dan kemudian pada tahap selanjutnya penduduk miskin mulai memperoleh manfaat ketika penduduk kaya mulai membelanjakan hasil dari pertumbuhan ekonomi yang telah diterimanya. Dengan demikian, maka pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan angka kemiskinan merupakan efek tidak langsung oleh adanya aliran vertikal dari penduduk kaya ke penduduk miskin. Hal ini berarti juga bahwa kemiskinan akan berkurang dalam skala yang sangat kecil bila penduduk miskin hanya menerima sedikit manfaat dari total manfaat yang ditimbulkan dari adanya pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini dapat membuka peluang terjadinya peningkatan kemiskinan sebagai akibat dari meningkatnya ketimpangan pendapatan yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih memihak penduduk kaya dibanding penduduk miskin. Oleh sebab itu, maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berdampak positif bagi pengurangan kemiskinan bilamana pertumbuhan ekonomi yang terjadi berpihak pada penduduk miskin.

Hal ini sejalan dengan penelitian (Adelowokan et al., 2019) Studi ini menunjukkan bahwa meskipun ada populasi miskin yang ditentukan oleh angka absolut, output suatu negara akan meningkat. Meskipun jumlah penduduk miskin meningkat, perekonomian akan terus tumbuh. Juga

dalam jangka pendek, meskipun jumlah penduduk miskin meningkat dari tahun ke tahun, perekonomian tetap tumbuh. Perlu adanya kebijakan makroekonomi yang stabil untuk menjamin pemerataan pendapatan sehingga masyarakat miskin juga mendapat manfaat dari pertumbuhan Negara.

Pengaruh Belanja Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan

Belanja infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan secara simultan atau secara bersama-sama terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Zamzami dkk (2021) hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh Belanja Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/kota di Provinsi Jambi berpengaruh Positif dan Tidak Signifikan. Sejalan dengan penelitian Cordelia (2019) di Nigeria yang berjudul “Government Sectoral Expenditure and Poverty Alleviation in Nigeria” menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk pertanian, bangunan dan konstruksi, pendidikan dan kesehatan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di Nigeria. Oleh karena itu, studi tersebut menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah tidak mencukupi dan merekomendasikan agar lebih banyak dana dianggarkan untuk meningkatkan sektor ini guna memberantas masalah kemiskinan tersebut. Dan pengaruh Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/kota di Provinsi Jambi berpengaruh negatif dan Tidak Signifikan.

Dalam Teori Pertumbuhan Klasik menurut Ricardo dan Mill, dalam jangka Panjang perekonomian akan mencapai stationary state, dimana suatu keadaan perkembangan ekonomi tidak terjadi sama sekali. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Eko Juli Prasetyo (2020), Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah untuk Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan, dan PDRB Terhadap Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur Tahun 2014-2018, menunjukkan hasil bahwa pengeluaran infrastruktur mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Todaro (2013) mengartikan bahwa pembangunan merupakan suatu proses multidimensi yang menyeluruh dan meliputi cakupan pada berbagai perubahan yang mendasar terhadap status sosial, sikap masyarakat, serta institusi lainnya, tidak hanya mengejar pada akselerasi pada pertumbuhannya saja, akan tetapi juga melakukan berbagai penanganan terhadap masalah lainnya seperti masalah ketimpangan dan program pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

Salah satu upaya untuk menanggulangi kemiskinan yang cukup efektif adalah pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dasar yang terintegrasi dengan baik akan meningkatkan kondisi pembangunan daerah. Dengan ketersediaannya infrastruktur yang baik akan mampu memperlancar mobilitas perekonomian rakyat sehingga pendapatan rakyat akan meningkat. Pembangunan infrastruktur yang baik juga akan menjamin efektivitas dan efisiensi, serta akan memperlancar pergerakan barang dan jasa dan akan meningkatkan perekonomian. Dengan meningkatnya perekonomian, tentu juga akan meningkatkan penghasilan masyarakat.

Salah satu upaya untuk menanggulangi kemiskinan yang cukup efektif adalah pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dasar yang terintegrasi dengan baik akan meningkatkan kondisi pembangunan daerah. Dengan ketersediaannya infrastruktur yang baik akan mampu memperlancar mobilitas perekonomian rakyat sehingga pendapatan rakyat akan meningkat. Pembangunan infrastruktur yang baik juga akan menjamin efektivitas dan efisiensi, serta akan memperlancar pergerakan barang dan jasa dan akan meningkatkan perekonomian. Dengan meningkatnya perekonomian, tentu juga akan meningkatkan penghasilan masyarakat.

Masalah ketimpangan antar wilayah masih menjadi masalah yang harus diselesaikan karena tujuan pemerintah dalam melakukan pembangunan seringkali dipertanyakan antara fokus pada pertumbuhan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat. Menurut hipotesis Kuznet dalam kurva U-

terbalik, fase pertumbuhan suatu negara, distribusi pendapatan akan cenderung rendah. Namun, ketika pertumbuhan terus terjadi dan lebih tinggi maka distribusi pendapatan akan lebih baik dan menjangkau segala lapisan atau disebut merata (Zulfariska & Bariyah, 2021).

KESIMPULAN

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian serta hasil analisis yang telah dilakukan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Belanja infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2017-2022.
2. Belanja infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2017-2022. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan belanja infrastruktur tidak mampu mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2017-2022. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak mampu mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang didapatkan, maka saran dapat diberikan oleh penulis pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah dapat meningkatkan belanja infrastruktur di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk Pembangunan jalan, jaringan, irigasi, dan program-program yang mendukung kesejahteraan masyarakat.
2. Kebijakan ekonomi yang dirancang untuk merangsang pertumbuhan ekonomi perlu dipertimbangkan, seperti insentif bagi investasi swasta, pengembangan sektor-sektor ekonomi yang potensial, dan program-program untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya menambahkan variabel lain, misalnya pendapatan, belanja modal, indeks pembangunan manusia, pengangguran dan sebagainya. karena masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain itu juga diharapkan untuk memperluas pembahasannya sehingga kemiskinan dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeny, Alvia Ayu. 2016. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Tenaga Kerja, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta. Skripsi. Surakarta.
- Atthohiroh, Fatimah. 2018. Analisis Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Terhadap Pertumbuhan ekonomi Di Kawasan Indonesia Timur (Periode 2010-2015). Skripsi. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara. 2022. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2022.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara. 2022. Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2022.
- Betaliya, D., Fatimah, E., Arbiansa, I., & Novariata, H. (2021). *PENGARUH TINGKAT KEMISKINAN TERHADAP PERTUMBUHAN DAN STRUKTUR EKONOMI DI KABUPATEN GORONTALO 2019-2021*. 1–7.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu RI. “Belanja Menurut Fungsi Pada Realisasi APBD”. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>. Diakses pada 18 November 2023
- Finuliyah, F., & Khusaini, M. (2022). Pendapatan Asli Daerah, Belanja Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Wilayah. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 1(1), 19.
- Gujarati, Damodar N, (2003). Basic Ecomentric Forth Edition. New York: Mc Graw-Hill.

- Hapsari, T. (2011). Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Skripsi*, 108, 24.
- Hastuti, A. T. (2016). Analisis Kemiskinan dan Ketersediaan Infrastruktur di Pedesaan Kawasan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur. *Jurnal Universitas Brawijaya*.
- Kodoatie, R.J. 2003. *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Luter, M., Indrocahyo, I., & Resti, I. L. V. (2019). Pengaruh Belanja Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 17(2), 38–48. <https://doi.org/10.29259/jep.v17i2.9533>
- Mas'ud, A. G., & Rochaida, E. (2022). Determinan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan. *Forum Ekonomi*, 24(1), 92–102. <https://doi.org/10.30872/jfor.v24i1.10393>
- Mankiw, N. G. (2003). *Teori Makroekonomi*. Erlangga.
- Mangkoesobroto. 1994. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Novriansyah, M. A. (2018). Pengaruh Pengangguran Dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Selatan. *E-Jurnal Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Gorontalo*, 1(1), 59–73. <https://doi.org/10.32507/ajei.v1i1i2.636>
- Panjaitan, H. A. M., Mulatsih, S., & Rindayati, W. (2019). Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 8(1), 43–61. <https://doi.org/10.29244/jekp.v8i1.29898>
- Prasetyo, E. J. (2020). Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah untuk invrastruktur pendidikan, kesehatan dan PDRB Terhadap kemiskinan di Nusa Tenggara Timur Tahun 2014-2018. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*.
[http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/54283%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/54283/1/EKO JULI PRASETIO-FEB.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/54283%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/54283/1/EKO%20JULI%20PRASETIO-FEB.pdf)
- Putri, R. A., Zamzami, & Rahmadi, S. (2021). Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *E-Journal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 10(2), 107–122.
- Sabarudin. (2014). *Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pulau Sulawesi*. 1–76.
- Sumodiningrat, Gunawan. 2009. *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa*. Jakarta: Gramedia
- Sumodiningrat, Gunawan. 1997. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, edisi kedua. Jakarta: Bina Rena Pariwisata.
- Saputra, N. D., Valeriani, D., & Chiristaningrum. (2021). Pengaruh Infrastruktur Ekonomi dan Infrastruktur Sosial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *E-Jurnal Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Baturaja*, 1(2), 111–123. <https://journal.unbara.ac.id/index.php/klassen/article/view/991%0Ahttp://journal.unbara.ac.id/index.php/klassen/article/download/991/646>
- Sudjarwadi, 2003. dalam Suwarni. 2005. Pengaruh Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (Jituh) Terhadap Pendapatan Petani Padi di Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat. *Skripsi Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Teuku Umar Meulaboh, Aceh Barat*.
- Suparmoko. 1994. *Pengantar Ekonomi Makro*. Yogyakarta. BPFE. UGM.
- Tinambunan, E. victara, Findi, M., & Purnamadewi, Y. L. (2020). Dampak Pembangunan Infrastruktur dalam Mendorong Pertumbuhan untuk Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2013 – 2017. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 8(1), 20–42. <https://doi.org/10.29244/jekp.v8i1.29447>
- Undang-undang No 33 tahun 2004 tentang keuangan daerah.
- Wadana, R. K., & Prijanto, W. J. (2021). Analisis Pengaruh Infrastruktur, Tingkat Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali 2015-2020. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(06), 875–885. <https://doi.org/10.46799/jst.v2i6.303>
- Wibowo, G. S. (2020). PDRB Kota Jawa Barat periode 2011-2016.
- World Bank. 1994. *World Development Report 1994: Infrastructure for Development*.
- Yasinta, B. L. (2018). Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Belanja Infrastruktur, dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 1(4), 144.